

BAB III

TERBENTUKNYA GAGASAN MENGENAI KELAUTAN DAN TERUMBU KARANG “*CORAL TRIANGLE INITIATIVE FOR CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (CTI-CFF)*” DI KAWASAN SEGITIGA TERUMBU KARANG DUNIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya kerjasama multilateral CTI-CFF, program-program yang tengah berjalan di dalam kerjasama ini, Pembentukan Rencana Aksi Regional, serta pembentukan Komite Koordinasi Nasional oleh Negara anggota *Coral Triangle 6* sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Regional CTI-CFF.

A. Sejarah Terbentuknya *Coral Triangle Initiative For Coral Reefs, Fisheries And Food Security*

Indonesia yang terletak di pusat segitiga karang dunia dianugerahi keragaman serta kelimpahan karang dan ikan yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia tergantung dari ikan dan sumberdaya laut lainnya sebagai sumber mata pencaharian dan sumber makanan utamanya. Jasa lingkungan lain yang disediakan oleh sumberdaya laut seperti terumbu karang sebagai pelindung secara ekonomi dan budaya masyarakat saat ini semakin dipahami. Namun demikian, sejalan dengan pemahaman masyarakat yang meningkat, sumber

daya laut berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini timbul karena dipicu oleh insentif jangka pendek untuk mencapai keuntungan ekonomi sesaat, tercermin dalam kegiatan penangkapan yang berlebihan, perusakan sumber daya alam seperti penangkapan dengan menggunakan sianida atau bahan peledak. Perubahan iklim global dan pembangunan fisik yang tidak direncanakan dengan baik memperburuk kondisi sumber daya pesisir dan laut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memahami, bahwa untuk menghadapi tantangan yang berat ini Indonesia tidak dapat bekerja sendiri. Pada bulan Agustus 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan surat kepada 7 pemimpin negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, Timor Leste, Amerika Serikat, dan Australia untuk mengusulkan sebuah inisiatif baru yang diberi nama *Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI -CFF).¹⁷ Para pemimpin negara tersebut merespon secara positif, dan pada awal September 2007 CTI secara formal dikukuhkan dalam *APEC Leaders Declaration on Climate Change, Energi Security dan Clean Development* di Australia. CTI sekali lagi dikukuhkan secara formal pada

¹⁷ <http://www.coraltriangleinitiative.org/about-us/>. About CTI-CFF. diakses pada 4 Oktober 2012.

bulan Nopember 2007 oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Kepulauan Solomon, Papua Newgini dan Negara-negara ASEAN.¹⁸

Kemudian dilakukan persiapan untuk pertemuan para pejabat senior (*Senior Official Meeting*) dari masing-masing negara anggota CTI untuk menyepakati beberapa hal untuk CTI kedepan. Ke enam negara tersebut bertemu pada pertemuan fomal pertama di Bali pada tanggal 6-7 Desember 2007, yang menyepakati beberapa hal, antara lain :

1. Sebuah pemahaman bersama tentang nilai manfaat sumberdaya hayati laut dan pesisir dari Kawasan Segitiga Karang (*Coral Triangle Area*) dunia.
2. Kesepakatan tentang 9 prinsip kerjasama CTI
3. Kerangka kerja untuk CTI Plan of Action (Rencana Kerja CTI) yang akan dikembangkan selama tahun 2008 dan diadopsi oleh pejabat tertinggi dari masing-masing negara.

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan konsultasi yang dihadiri pejabat senior dari Australia, Amerika Serikat, dan beberapa NGO. Masing-masing pihak tersebut juga mendukung hasil-hasil yang telah disepakati oleh 6 negara *Coral Triangle* (CT6) dan menyatakan dukungan masing-masing untuk proses selanjutnya. Lanjutan dari pertemuan

¹⁸http://www.nccctiindonesia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53&

tersebut, perwakilan dari masing-masing negara dan beberapa organisasi bertemu dengan Presiden Yudhoyono untuk melaporkan hasil-hasil dan kesepakatan dari *Senior Official Meeting*.

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, terdapat Roadmap pertemuan-pertemuan lainnya, antara lain *CTI Ministerial Meeting di Port Moresby* tanggal 13 Maret 2009, *CTI High Level official Prep Com Meeting* di Jakarta tanggal 6-7 April 2009, dan *CTI Senior Official Meeting and Informal Ministerial Meeting* di Manado tanggal 12-13 Mei 2009.¹⁹ Sebagai puncak dari rangkaian pertemuan dan perencanaan yang telah dilakukan selama ini adalah terselenggaranya pertemuan Kepala Negara/ Pemerintahan dari 6 negara CTI pada *CTI Summit* di Manado pada tanggal 15 Mei 2009.²⁰ *CTI Summit* ini menghasilkan *CTI Leaders Declaration* yang pada intinya antara lain :

1. Peluncuran program *Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security* oleh 6 Kepala Negara/Pemerintahan;
2. Mengadopsi *CTI Regional Plan of Action* untuk mengkonservasi dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut di kawasan Coral Triangle;

¹⁹http://www.nccctjindonesia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53&lang=en, *op.cit*

²⁰ www.setneg.or.id, *Pelaksanaan World Ocean Conference Dan Coral Triangle Initiative Summit*, diakses pada 5 November 2012.

3. Implementasi CTI bersifat *voluntary* dan berdasarkan Undang-Undang, peraturan, kebijakan dan prioritas nasional masing-masing negara;
4. Menyepakati pembentukan Sekretariat Regional CTI yang bersifat permanen;
5. mendorong mobilisasi dan alokasi sumber dana yang berkelanjutan untuk pelaksanaan *CTI Regional and National Plan of Action*.

B. Program yang Sedang Berjalan dalam CTI-CFF

Dari mulai terbentuk pada tahun 2007, CTI-CFF telah memiliki banyak program yang telah berhasil direalisasikan sampai saat ini, program-program tersebut antara lain :

1. Implementasi NPoA yang sejalan dengan program nasional masing-masing negara, di mana di Indonesia dialokasikan 15 milyar /tahun.
2. *United States CTI Support Program*, dengan total hibah sebanyak USD 45 juta selama 5 tahun untuk 6 negara.²¹

²¹ www.uscti.org, *Komitmen USAID terhadap CTI-CFF*, diakses pada 10 Oktober 2012

3. *Australia CTI Support Program (AUSD)*, dengan total pembiayaan USD 3 juta untuk mensupport penyusunan dokumen pendirian sekretariat regional dan kegiatan lain-lain selama 5 tahun.²²
4. *Asian Development Program/ Global Environment Facility Knowledge Management Project*, dengan total USD 1,2 juta untuk pengembangan Jejaring Pengetahuan selama 3 tahun.²³
5. Aktivitas aktivitas NGO (The Nature Conservancy, World Wild Fund dan Conservation International) dengan anggaran masing-masing.
6. *Coral Triangle Learning Network by Coral Triangle Centre* yaitu organisasi NGO yang fokus pada kegiatan training berbagai aspek terkait Kawasan Segitiga Karang serta memfasilitasi atau menjadi tuan rumah regional dan *national learning networks*.²⁴ Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota untuk mengkoordinasikan strategi yang bersifat lintas batas, mengadaptasi dan mengaplikasikan pendekatan konservasi laut, dan berbagi pengalaman dan *best-practices* yang dibutuhkan untuk secara efektif mengelola sumberdaya laut di kawasan Coral Triang

²² www.kiara.or.id, Laporan Publik WOC-CTI, diakses pada 11 Oktober 2012.

²³ www.uscti.org, *op.cit*

²⁴ The Nature Conservancy, *Mitra dalam Konservasi Laporan Tahunan 2008*, Jakarta, 2008.

C. Regional Plan of Action Coral Triangle Initiative For Coral Reefs, Fisheries And Food Security

Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle Initiative-CTI*) merupakan upaya kemitraan antar pemerintah dari Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon yang didedikasikan untuk mempromosikan laut yang sehat dengan membantu masyarakat mengelola sumber daya laut mereka melalui penciptaan dan penguatan Kawasan Perlindungan Laut (*Marine Protected Area*).²⁵ Selain itu, kemitraan ini juga berupaya mempromosikan manajemen bentang laut pada skala besar, meningkatkan perikanan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan memulihkan spesies yang terancam punah. Kerjasama ini tentunya tidak begitu saja bisa terbentuk, akan tetapi melalui proses negosiasi yang panjang, dan atas inisiatif dari Presiden Republik Indonesia akhirnya terbentuklah kerjasama multilateral CTI-CFF ini.

Semangat dan filosofi dasar dari program CTI adalah pengelolaan kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil. Di situlah letak perbedaan mendasar program kerjasama regional CTI dengan berbagai program kerjasama di bidang perikanan dan kelautan yang ada saat ini di kawasan Asia Pasifik. CTI tidak hanya mengajukan program pengelolaan kawasan

²⁵ M. Eko Budiarto, *CTI-CFF Learning Network* dalam jurnal *Tata Kelola Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau*

konservasi terbatas ataupun penanganan spesies tertentu, tetapi lebih jauh dari itu, CTI mengajukan upaya pengelolaan kawasan yang lebih luas secara komprehensif. Pendekatan holistik berupa pengelolaan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi terobosan untuk menangani berbagai permasalahan yang saling terkait di bidang perikanan kelautan.

Prinsip-prinsip dasar CTI-CFF mencantumkan perlunya negara-negara anggota mengidentifikasi dan menetapkan kawasan prioritas (*priority geographies*), baik di dalam wilayah yurisdiksi masing-masing, maupun di wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki isu antar-perbatasan (*trans boundary*) di aspek perikanan kelautan.²⁶ Prinsip-prinsip dasar CTI-CFF selanjutnya diterjemahkan oleh keenam negara anggota ke dalam Rencana Aksi Regional.

Regional Plan of Actions menggambarkan tujuan utama, target-target dan program-program aksi tingkat regional yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan. Sebanyak lima tujuan besar, sepuluh target dan 38 program aksi regional ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sampai dengan tahun 2020.²⁷ Lima tujuan utama tersebut antara lain :

1. Penetapan dan pengelolaan secara efektif kawasan *bioecoregional (seascapes)*. Terkait dengan tujuan pertama

²⁶ *Regional Plan of Action: coral triangle initiative on coral reefs, fisheries and food security (CTI-CFF)*, interim regional CTI, Jakarta, 2009, hal 23.

²⁷ *Ibid*, Hal 25

yaitu Penetapan dan pengelolaan secara efektif kawasan *bioecoregional (seascapes)*, dimana menurut klasifikasi Marine Ecoregions of the World (MEOW) perairan laut wilayah segitiga terumbu karang dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) *ecoregions* / kawasan bentang laut, di mana pada masing-masing bentang laut memiliki perbedaan dalam hal keanekaragaman spesies, endemisme, kelompok spesies yang terancam punah, tingkat keunikan bentang alam, dan perbedaan faktor lainnya. Kawasan-kawasan tersebut perlu disusun rencana pengelolaannya secara baik dan efektif.

2. Penerapan secara utuh pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. Hal ini diharapkan dapat dicapai antara lain melalui penyediaan kerangka hukum, kebijakan dan perundang-undangan yang mendorong pengelolaan sumberdaya laut berbasis pendekatan ekosistem di masing-masing negara. Tujuan tersebut juga diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kerjasama antar negara dalam menangani *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.²⁸

3. Penetapan dan pengelolaan secara efektif Jejaring Kawasan Konservasi Laut. Penetapan dan pengelolaan secara efektif Jejaring Kawasan Konservasi Laut yang merupakan tujuan ketiga CTI diharapkan dapat dicapai melalui ditetapkannya laut sebagai kawasan konservasi laut untuk kemudian diharapkan dapat dikelola secara efektif. Indonesia sendiri telah menetapkan target kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020.²⁹ Negara-negara lain diharapkan menerapkan hal yang sama, sehingga di seluruh kawasan CT akan terdapat jejaring kawasan konservasi laut yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan, sehingga keanekaragaman hayati laut dapat dijaga. Bersama-sama dengan tujuan kedua, tujuan ini dapat membantu tercapainya ketahanan pangan, khususnya terkait dengan ketersediaan stok ikan yang berkelanjutan.

4. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim diharapkan dapat dicapai dengan menyusun rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim, baik di tingkat regional maupun nasional. Aktivitas penting yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan

²⁹ Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi, *Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan*, dalam *Jurnal Program MFCDP vol 34*.

menyusun peta kerentanan kawasan terhadap perubahan iklim, upaya konservasi terhadap kawasan rentan serta meningkatkan kepedulian publik. Dalam hal terumbu karang misalnya, salah satu upaya adaptasi yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas ekosistem terumbu karang. Penelitian menunjukkan bahwa, ekosistem terumbu karang dalam kondisi yang baik akan mampu meningkat ketahanannya terhadap perubahan iklim, atau walaupun terkena akibat perubahan iklim, ekosistem tersebut akan cepat pulih.

5. Membaiknya status *spesies-spesies* yang terancam punah. Seperti kita ketahui bersama bahwa upaya menyelamatkan species terancam punah seperti penyu, mamalia laut, dugong, burung-burung laut, hiu dll membutuhkan upaya-upaya yang bersifat regional, karena hampir seluruh species tersebut bermigrasi lintas negara. Upaya penyelamatan pada satu negara saja akan tidak efektif, apabila di negara lain tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan spesies terancam punah mencakup upaya penyelamatan habitat, jalur migrasi, pengendalian perdagangan dan distrib

D. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Negara-negara Anggota *Coral Triangle* 6 sebagai Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Regional CTI-CFF

Untuk mengimplementasikan tujuan dari Rencana Aksi Regional CTI-CFF, maka masing-masing Negara di kawasan *Coral Triangle* 6 membentuk Komite Koordinasi Nasional sebagai Komite yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional yang telah ditetapkan oleh masing-masing Negara.

1. Indonesia

Komite Koordinasi Nasional Indonesia untuk CTI-CFF dibentuk pada tahun 2009 yang bertugas memimpin pelaksanaan Rencana Aksi Regional di Negara-negara anggota CTI-CFF dan memimpin pelaksanaan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF di Indonesia.³⁰ Komite Koordinasi Nasional terdiri dari perwakilan beberapa kementerian, organisasi non-pemerintah, mitra pembangunan dan akademisi. Komite ini memiliki tujuh kelompok kerja, lima di antaranya mencakup bidang teknis seperti bentang laut, perikanan, kawasan perlindungan laut, perubahan iklim, perlindungan spesies yang terancam punah dan dua lainnya sebagai pemantau dan pengevaluasi. Dimana

³⁰ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/indonesia>, *CTI: Indonesia*, diakses pada 14 Oktober

Kelompok kerja ini dipimpin oleh perwakilan dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Tujuan dan kegiatan dari Rencana Aksi Nasional CTI-CFF di Indonesia terkait erat dengan Rencana Aksi Regional CTI-CFF serta terkait juga dengan strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan konservasi terumbu karang bagi kelangsungan perikanan dan ketahanan pangan dan membantu memastikan bahwa tujuan nasional sejalan dengan tujuan regional.

Indonesia telah menyiapkan anggaran khusus yang diambil dari APBN untuk pelaksanaan CTI-CFF dan telah menyetujui untuk menjadi Sekretariat tetap regional untuk CTI-CFF. Indonesia juga menjadi tuan rumah berbagai kegiatan regional terkait dengan CTI-CFF dan wakil-wakil dari Indonesia berhasil duduk sebagai pemimpin dalam kelompok kerja CTI-CFF. Di tingkat nasional, Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF telah sukses memimpin berbagai upaya, diantaranya, identifikasi bentang laut, penyelesaian Peraturan Pemerintah mengenai zona penangkapan ikan yang mendukung perikanan berkelanjutan, membentuk 1,2 juta hektar kawasan perairan sebagai kawasan konservasi melakukan kampanye dan memberikan informasi terhadap

masyarakat terkait perubahan iklim, serta pengembangan sekolah untuk konservasi laut dan pelembagaan pelatihan mengenai area perlindungan laut.³¹

2. Malaysia

Direktorat Oceanografi Nasional di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi merupakan Sekretariat Nasional bagi Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF di Malaysia. Anggotanya terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah federal dan instansi negara. Pada tingkat federal, anggotanya merupakan perwakilan dari Departemen Perumahan dan pemerintahan Daerah, Departemen Perhubungan, Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Tinggi, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Agro Industri, Departemen Keuangan, Departemen Pariwisata, serta Perdana Menteri. Pada tingkat negara, anggotanya terdiri dari Pemerintah Negara Sabah yang terdiri dari Departemen Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup serta Departemen Pertanian dan Industri Makanan. Komite Koordinasi Nasional Malaysia juga mendirikan sebuah kantor cabang CTI-CFF yang terletak di Universitas Malaysia Sabah untuk membantu Sekretariat Nasional.

Rencana Aksi Nasional Malaysia terkait CTI-CFF fokus pada pengembangan dan penerapan pendekatan manajemen yang inovatif untuk

³¹ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/indonesia>, *op.cit*

mengatasi risiko perubahan iklim dan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya laut. Hal ini mencakup 12 prinsip yang merupakan representasi atas komitmen Pemerintah Malaysia dalam berbagai perjanjian, kebijakan serta komitmen terhadap deklarasi di forum internasional yang mengandung 134 tindakan khusus yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pencapaian lima tujuan dari Rencana Aksi Regional CTI-CFF.³²

Malaysia juga menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan pertemuan internasional seperti Konferensi Internasional tentang Manajemen Kesehatan lingkungan laut tropis yang pertama kali diselenggarakan pada bulan Oktober 2010, Simposium CTI-CFF mengenai Riset Ilmiah dan Pengelolaan Berkelanjutan terhadap Kesehatan lingkungan perairan pada *Pacific Science Congress* ke 22 pada bulan Juni 2011 dan sukses menyelenggarakan *Regional Business Forum* CTI-CFF pada bulan Oktober 2011.³³

3. Filipina

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Filipina didirikan pada tahun 2009 yang bertanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi nasional CTI-CFF Filipina. Komite Koordinasi Nasional ini dipimpin oleh Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam serta Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan di bawah Departemen Pertanian. Anggotanya terdiri dari perwakilan

³² <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/malaysia>, *CTI-CFF: Malaysia*, diakses pada 14 Oktober 2012.

³³ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/malaysia>. *op.cit*

dari Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Ekonomi Nasional dan Pembangunan Otoritas, organisasi non-pemerintah, institusi akademik dan sektor bisnis.

Rencana Aksi Nasional Filipina terkait CTI-CFF merupakan representasi dari tujuan dan sasaran Rencana Aksi Regional CTI-CFF, dimana Rencana Aksi tersebut memiliki enam tema lintas sektor yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya konsisten dengan kerangka pengelolaan perairan terpadu yang sudah diterapkan di negara tersebut

Sejak awal berdirinya, Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Filipina telah memimpin berbagai proses dalam perumusan dan implementasi Rencana Aksi Regional CTI-CFF, selain itu juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Regional Business Summit* yang pertama kali diselenggarakan pada bulan Januari 2010, serta beberapa pertemuan Regional seperti pertemuan Regional CTI-CFF mengenai *Enhancing Local Government and Stakeholder Capacity for Ecosystem-based Fisheries Management* pada bulan Juni 2009 dan *the CTI-CFF Regional Exchange and Workshop on Monitoring and Evaluation for Improved Marine Protected Area Management Effectiveness in the Coral Triangle Countries* pada Mei 2011.³⁴

Di tingkat nasional, Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Filipina telah berhasil memimpin penyelenggaraan *adoption of the standardized*

³⁴ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/philippines>, *CTI-CFF Filipina*, diakses pada 15

Management Effectiveness Assessment, yaitu sebuah sistem yang digunakan secara luas di seluruh wilayah negara untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut dan menunjukkan gambaran yang komprehensif mengenai perairan laut Filipina sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.³⁵ Komite Koordinasi Nasional juga memimpin pengembangan Rencana Aksi Nasional terkait larangan penangkapan ikan secara ilegal, dan mendorong terciptanya peraturan daerah mengenai perdagangan ikan karang hidup serta memimpin pelaksanaan *climate change vulnerability assessments in key marine biodiversity sites* di dalam negeri.

4. Papua Nugini

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Papua Nugini didirikan oleh Dewan Eksekutif Nasional pada bulan Mei 2009 untuk memberikan koordinasi intra pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan CTI-CFF. Komite Koordinasi Nasional dipimpin oleh Departemen Lingkungan dan Konservasi, Otoritas Perikanan Nasional, serta Kantor Perubahan Iklim dan Pembangunan. Anggotanya meliputi Departemen Perencanaan Nasional dan Pemantauan perdagangan Luar Negeri, Perdana Menteri dan Dewan Eksekutif Nasional serta pemerintah tingkat provinsi.

Program Perintah Papua Nugini terkait kelautan, terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan 2010-2015 merupakan cerminan Rencana

³⁵ http://www.coraltriangleinitiative.org/country/philippines_op.cit

Aksi Nasional CTI-CFF Papua Nugini dengan memasukkan lima tujuan utama dari Rencana Aksi Regional CTI-CFF. Program ini mengintegrasikan tindakan prioritas dari semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara terpadu untuk memastikan manajemen yang efektif terhadap sumber daya kelautan untuk mempertahankan populasi di wilayah pesisir.³⁶

Sejak berdirinya, Komite Koordinasi Nasional merupakan penghubung bagi lembaga akademik, organisasi non-pemerintah dan para pemimpin lokal sebagai mitra penting dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional. Pada tingkat regional, Komite Koordinasi CTI-CFF Papua Nugini telah memimpin *hosting key CTI-CFF meetings* dan beberapa pertemuan regional seperti *the Third CTI-CFF Senior Officials Meeting* pada tahun 2009 dan *the CTI-CFF Course on Climate Change Adaptation for Coastal Communities and Training of Trainers* pada bulan September 2011.

Di tingkat nasional, Komite Koordinasi Nasional telah memimpin implementasi pelaksanaan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan lokal, implementasi adaptasi perubahan iklim dan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan di wilayah konservasi laut, serta memfasilitasi kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan efektifitas pengelolaan lingkungan laut mereka.

³⁶ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/papua-new-guinea>, *CTI-CFF : Papua New Guinea*,

5. Timor Leste

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Timor Leste memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF yang bekerja sama dengan mitra pembangunan dan Organisasi non-pemerintah. Keanggotaan Komite Koordinasi Nasional terdiri dari wakil-wakil dari Departemen Pertanian dan Perikanan serta instansi pemerintah yang lain.

Sejak berdirinya pada tahun 2009, Komite Koordinasi telah aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan regional CTI-CFF dan memimpin berbagai pelaksanaan inisiatif nasional seperti skema pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di beberapa wilayah tertentu. Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Timor Leste menjadi tuan rumah pada *Training Course on Ecosystem Approaches to Managing Coastal and Marine Resources* pada bulan Juli 2011.³⁷

6. Kepulauan Solomon

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Kepulauan Solomon didirikan sebagai mekanisme untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan implementasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Regional di tingkat Negara. Komite Koordinasi Nasional ini dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, Manajemen Bencana dan Meteorologi

³⁷ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/timor-leste>, *CTI-CFF: Timor Leste*, diakses pada 17

serta Kementerian Perikanan dan Kelautan. Anggotanya antara lain adalah, Organisasi masyarakat non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sendiri.

Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Kepulauan Solomon difokuskan untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat kepada pengelolaan sumber daya terpadu di mana masyarakat akan menjadi pendorong utama serta penerima manfaat dari pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh strategi lintas sektor seperti pengembangan legislasi kebijakan dan kemitraan kelembagaan, manajemen data dan koordinasi untuk pengambilan keputusan. Rencana Aksi Nasional bertujuan untuk memastikan bahwa 25% dari wilayah pesisir Kepulauan Solomon, wilayah aliran sungai dan wilayah perairan pantai berada di bawah manajemen pengelolaan yang baik sehingga akan mengalami peningkatan sebesar 40% pada tahun 2015 melalui pengelolaan sumber daya terpadu berbasis pendekatan pengelolaan wilayah pantai.³⁸

Dari November 2009 hingga 2011, Kepulauan Solomon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Menteri CTI-CFF dan menjadi tuan rumah pada pertemuan kedua para pejabat senior CTI-CFF pada tahun 2009. Pada tingkat regional Kepulauan Solomon telah mengambil peran aktif dalam adaptasi perubahan iklim dan menjadi pemimpin pada kelompok kerja teknis CTI-CFF pada Adaptasi Perubahan Iklim dengan Indonesia. Kepulauan Solomon juga

³⁸ <http://www.coraltriangleinitiative.org/country/solomon-islands>, *CTI-CFF: Solomon Islands*, diakses

menjadi tuan rumah pada *the Second CTI-CFF Regional Exchange on Climate Change Tools for Action* pada bulan April 2011.³⁹

Di tingkat nasional, Komite Koordinasi Nasional telah mengembangkan kemitraan dengan pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional. Komite ini juga memimpin perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim untuk sektor kelautan pada bulan November 2011 serta mempromosikan pelatihan dan kesadaran mengenai isu-isu tentang kawasan perlindungan laut dan perubahan iklim serta mempercepat apresiasi dan pelaksanaan langkah-langkah adaptasi pada masyarakat Kepulauan Solomon.

Dari paparan di atas kita dapat mengetahui bahwa dengan terbentuknya kerja sama multilateral CTI CFF maka Negara-negara yang termasuk kedalam wilayah Segitiga Terumbu Karang mengambil langkah khusus dengan membentuk Komite Koordinasi Nasional terkait adanya *Coral Triangle Initiative For Coral Reefs, Fisheries And Food Security* yang bertujuan untuk menjalankan Rencana Aksi Nasional masing-masing Negara. Dalam hal ini Negara Indonesia sebagai Negara penggagas CTI-CFF juga telah membentuk suatu Komite Koordinasi Nasional yang bertugas untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Indonesia sebagai salah satu upaya mencapai kepentingan nasional

³⁹ http://www.coraltriangleinitiative.org/country/solomon-islands_on_cit